

BAB IV



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2023) yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina.

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya SDM	Akses terhadap pendidikan menengah rendah	- Masih rendahnya anak usia sekolah yang bersekolah - Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan diwilayah terpencil - Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah - Sebaran sekolah yang tidak merata
Rendahnya Umur Harapan Hidup	Akses terhadap layanan kesehatan rendah	- Masih tingginya Angka Kematian Ibu - Masih Tingginya Angka kematian bayi - Masih tingginya angka kematian balita - Rendahnya derajat kesehatan - Belum meratanya tenaga kesehatan - Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan - Tingginya kasus gizi buruk - Tingginya angka Stunting - Jangkauan Jamkesmas yang belum merata
Kemiskinan	Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial	- Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi - Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial
	Pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin belum optimal	Lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK dan Posyandu di tingkat desa belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	Sebaran Produksi yang tidak merata
		- ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata - masih rendahnya SDM petani
	Angka Konsumsi ikan per kapita yang rendah	belum optimalnya produksi perikanan budidaya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		cakupan binaan terhadap kelompok nelayan miskin dan rentan miskin yang belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	- Sebaran Produksi yang tidak merata - ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata
	Rendahnya pendapatan Masyarakat miskin	Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah.
	Rendahnya pendapatan Masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat
	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup	- Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang - Belum terpenuhinya jumlah, kualitas dan sebaran tenaga kesehatan - Tingginya kasus gizi buruk dan gizi kurang - Rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan - Rendahnya derajat kesehatan - Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak - Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan - Rendahnya kesejahteraan masyarakat
	Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah	- Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan diwilayah terpencil - Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah - Kurangnya Guru yang berkualitas (sertifikasi)
	Rendahnya angka Harapan Lama Sekolah	Keadaan Geografis: Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik
Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) belum optimal	Rendahnya Pemahaman terkait Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI)	- Belum optimalnya pengarusutamaan GEDSI di level kebijakan dan regulasi - Belum optimalnya pemenuhan hak anak, disabilitas dan Inklusi

Handwritten signature or mark.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sosial lainnya • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan • Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan
	Belum optimalnya Penerapan sistim Akuntabilitas Kinerja	• Sebagian besar perangkat daerah belum memperbaiki rumusan tujuan dan sasaran strategis yang berorentasi hasil yang tertuang dalam renstra perangkat daerah • Kinerja sebagai perangkat daerah belum sepenuhnya belum beroretasi pada hasil (outcome) dan indikator kinerja yang tetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurabe), relevan dan cukup • Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terendan walaupun belum merata sampai diseluru perangkat daerah dan penjabarnya belum sepenuhnya di sadarkan kinerja organisasi dan kinerja level di atasnya. • Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasooil program terutama untuk program antara perangkat daerah • Analisis capaian kinerja belum di ungkpakan secara mendalam pada laporan kinerja. • Hasil evaluasi akuntanbilitas kinerja belkum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di level Perangkat Daerah

Handwritten signature or mark.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
INFRASTRUKTUR	Rendahnya ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	• Kurangnya air minum yang layak dan sanitasi yang bersih • Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat • Fasilitas umum belum ramah GEDSI • Keadaan Geografis : Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil
	Terbatasnya akses terhadap rumah layak huni	• masih rendahnya persentasi rumah dengan sanitasi dan air minum yang layak • masih adanya lingkungan kumuh • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sambungan listrik rumah
	Energi	• rendahnya Rasio elektrifikasi dari EBT dan non EBT di masyarakat tidak mampu dan terpencil
	Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon	• Cakupan penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih tinggi • Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang) • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air • Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energy dan transportasi. • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem.
	Jalan, jembatan dan SDA	• Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		masih tinggi; • Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi. • Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan. • Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi; • Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.
	Perhubungan	• Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan <i>guardrill</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi; • Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi; • Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi; • Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik); • Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian; • Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan <i>taksi online</i>; • Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah); • Adanya praktik percaloan tarif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penumpang/barang.
	Perbatasan	• Belum terselesaikannya PLBN
	Bencana	• Belum optimalnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana • Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan/Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) terhadap bencana
Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian daerah	Produksi dan Produktivitas pertanian masih rendah	• Pola pertanian masih subsisten • SDM pertanian masih rendah • Penggunaan teknologi, sarana dan prasarana pertanian masih rendah • Infrastruktur pendukung kurang memadai • Kondisi dan perubahan iklim tidak menentu • Kurang optimalnya pemanfaatan lahan • Akses permodalan masih terbatas • Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belum optimalnya penciptaan nilai tambah	Belum berkembangnya industri pengolahan	• Rendahnya SDM • Rendahnya akses permodalan • Belum optimalnya manajemen pengelolaan • Terbatasnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku • Rendahnya dukungan teknologi pengolahan
	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	• Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah • Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah
	Tenaga kerja tidak berbayar	• Rendahnya pengawasan ketenagakerjaan
Belum optimalnya kegiatan distribusi dan pemasaran	Peran Lembaga Ekonomi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditi dan produk	• Belum optimalnya ketersediaan dan peran lembaga ekonomi masyarakat

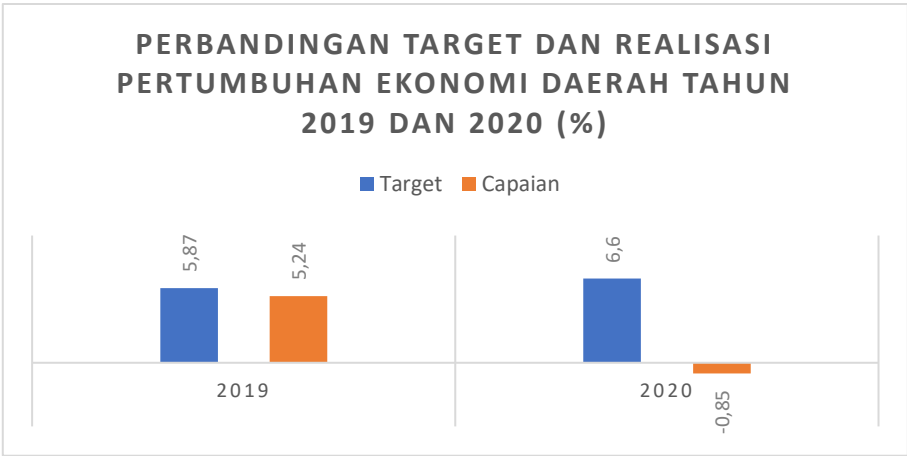
12

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketersediaan dan kontinuitas produk	- Kurangnya akses pada informasi pasar - Belum optimalnya pemasaran digital
Rendahnya kemandirian Fiskal	Tingginya ketergantungan fiskal	- Belum optimalnya pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah - Belum optimalnya pemanfaatan aset Daerah - Belum optimalnya pemanfaatan potensi – potensi pendapatan - Rendahnya Pola Investasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dari target sebagaimana yang telah ditetapkan, capaian indikator makro pembangunan sebagaimana berikut:

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

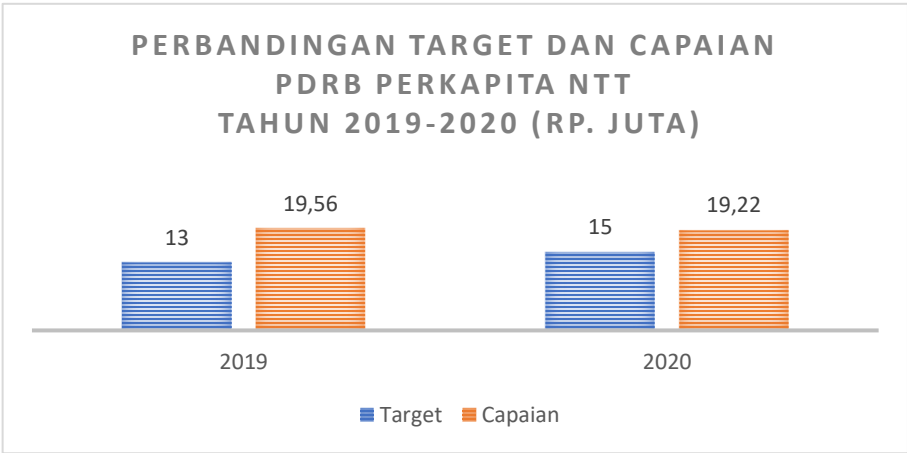
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pertumbuhan sebesar 5,87% pada Tahun 2019 dan 6,6% pada Tahun 2020, dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi daerah periode sebelumnya yang tumbuh diatas 5% pertahun, dan capaian Tahun 2017 yang sebesar 5,19%. Pada Tahun 2019 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,24% lebih tinggi 0,13 persen jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang sebesar 5,11% meskipun masih sedikit berada dibawah target RPJMD sebesar 5,87%. Pada Tahun 2020, ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar -0,85%. Perkembangan yang tidak diduga dan tidak ada presedennya ini juga dialami pada level nasional dan global, khususnya karena dalam rangka antisipasi meluasnya virus covid-19, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial yang mendorong melambatnya aktivitas ekonomi.



Gambar 4.1
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhn Ekonomi Daerah
Tahun 2019 dan 2020

4.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita menghitung besaran total PDRB pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Meningkatnya PDRB Perkapita mengindikasikan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pada Tahun 2017 PDRB perkapita NTT adalah sebesar Rp. 11,874 juta. Nominal tersebut menjadi baseline ketika Pemerintah Provinsi menyusun target pada tahun rencana 2019 dan 2020 sebesar masing-masing Rp. 13 juta dan Rp. 15 Juta. Capaian PDRB Perkapita pada Tahun 2019 dan 2020 melampaui target yang dipatok Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2019 PDRB Perkapita NTT mencapai Rp. 19,56 juta dan pada Tahun 2020 walaupun sedikit menurun menjadi Rp. 19,22 juta, namun tetap melampaui target pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.



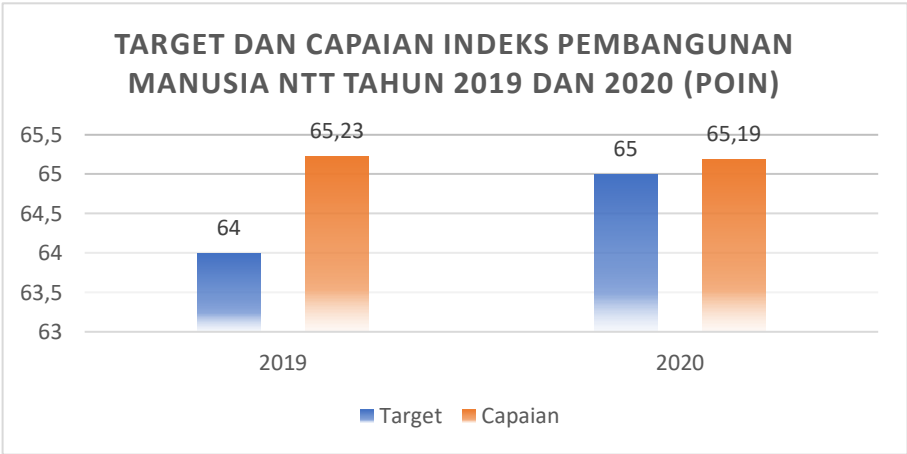
Gambar 4.2
Perbandingan Target dan PDR Per Kapita
Tahun 2019 dan 2020

Handwritten signature or mark.

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari tiga dimensi yaitu, kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. IPM dihitung dari empat komponen yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi perkapita. Semakin tinggi nilai IPM menandakan makin luasnya akses masyarakat terhadap pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, Pemerintah Provinsi

NTT menetapkan target IPM Provinsi NTT pada Tahun 2019 sebesar 64 poin dan pada Tahun 2020 sebesar 65 poin setelah melihat bahwa capaian pada Tahun 2017 yang digunakan sebagai baseline adalah sebesar 63,73 poin. Capaian IPM NTT pada Tahun 2019 adalah sebesar 65,23 poin, lebih tinggi dari target Pemerintah Provinsi NTT, sementara pada Tahun 2020 meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 65,19 poin, namun masih berada diatas target Pemerintah Provinsi NTT. Ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil yang positif yang menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan standar hidup.



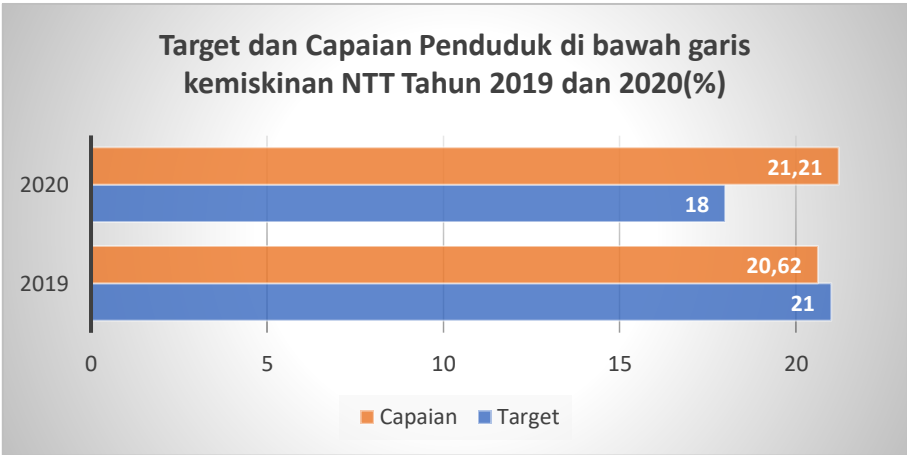
Gambar 4.3
Target dan Capaian IPM NTT Tahun 2019 dan 2020

4.1.4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti

32

semakin banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya. Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 21,35%. Berdasarkan angka tersebut Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan penurunan menjadi 21% pada Tahun 2019 dan 18% pada Tahun 2020.

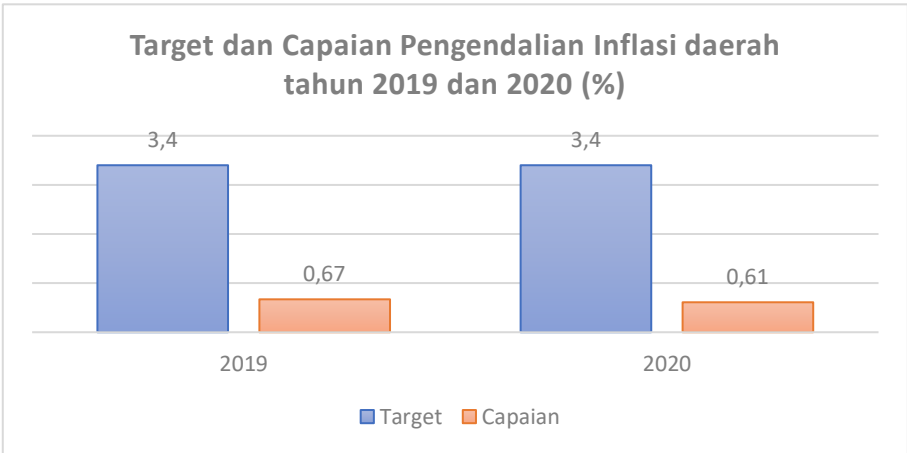


Gambar 4.4
Target dan Capaian Penduduk dibawah garis Kemiskinan
Tahun 2019 dan 2020

4.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian karena membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadi penurunan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. Dari sudut pandang pemerintah, inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena inflasi yang tinggi menyebabkan alokasi sumber daya yang direncanakan menjadi tidak lagi sesuai dengan situasi pada saat rencana tersebut dilaksanakan. Pada Tahun 2017, inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2%, capaian yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menargetkan inflasi berada pada level 3-3,4% pertahun untuk tahun rencana 2019-2020. Pada Tahun 2019 inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,67%, dan pada Tahun 2020 inflasi tahunan

menurun menjadi 0,61%. Rendahnya inflasi di Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dibaca sebagai kontraksi (pelemahan) terhadap keinginan berinvestasi.

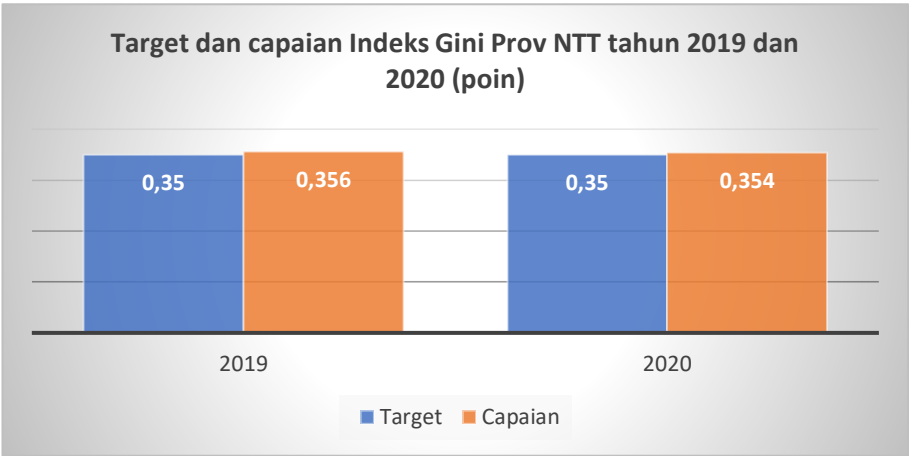


Gambar 4.5
Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah
Tahun 2019 dan 2020

4.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada Tahun 2017 Indeks Gini NTT tercatat sebesar 0,36. Berdasarkan perkembangan pada periode sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD NTT 2018-2023 menargetkan Indeks Gini pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,35. Pada Tahun 2019 capaian indeks gini NTT sedikit berada diatas target yaitu sebesar 0,356, sedangkan Tahun 2020 indeks Gini NTT menurun menjadi 0,354 atau sesuai target.



Gambar 4.6
Target dan Capaian Indeks Gini
Tahun 2019 dan 2020

4.1.7 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Sebaliknya semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Pada Tahun 2017 IPG NTT mencapai 92,44 poin. RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020 menargetkan IPG sebesar 93 poin. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 92,72 poin, sedikit berada dibawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 92,73 poin.

4.2 PERMASALAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan substansi masalah-masalah di atas, diperoleh isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:

20

4.2.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.2.1.1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun;
- b. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
- c. Masih Rendahnya cakupan Ketersediaan Guru SMA dan SMK yang berkompeten
- d. Masih rendahnya Cakupan SMA dan SMA berakreditasi B
- e. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
- g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di daerah terpencil.
- h. Terbatasnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim).

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana,
- b. Masih terbatasnya Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi,
- c. Terbatasnya kualitas layanan UKM dan UKP
- d. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
- e. Masih terdapat Kasus Kematian Ibu
- f. Masih terdapat Kasus Kematian Bayi dan Balita
- g. Masih tingginya angka Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) dan Underweight
- h. Masih Tingginya Prevalensi Stunting
- i. Masih terbatasnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- j. Terbatasnya Kasus HIV yang diobati
- k. Terbatasnya Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria
- l. Terbatasnya Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success

Rate) TBC>85%

- m. Terbatasnya Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta
- n. Rendahnya Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
- o. Rendahnya Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
- p. Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja
- q. Rendahnya cakupan kesehatan berbasis masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
- b. Belum semua jalan dan jembatan Kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap
- c. Terbatasnya Cakupan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Kecil dan bangunan penampung air
- d. Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota
- e. Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
- f. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Masih rendahnya Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak
- b. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
- c. Masih rendahnya Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik
- d. Masih rendahnya Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- e. Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
- f. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak
- g. Masih terbatasnya Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penegakan PERDA belum optimal
- b. Masih rendahnya Cakupan Pencegahan dan penanggulangan Daerah berpotensi Rawan kebakaran setiap Tahun

- c. Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate
- d. Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana
- e. Masih terbatasnya Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate
- f. Masih minimnya Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan

6. Urusan Sosial

- a. Masih rendahnya Cakupan PMKS
- b. Masih terbatasnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan
- c. Masih terbatasnya Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS
- d. Masih terbatasnya Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi
- e. Masih terbatasnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi

4.2.1.2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga kerja

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
- b. Rendahnya daya saing tenaga kerja
- c. Terbatasnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
- d. Terbatasnya cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi
- e. Terbatasnya penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja
- f. Masih terdapat perusahaan yang belum Melaksanakan Upah Minimum Provinsi
- g. Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja
- h. Terbatasnya Jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan untuk menilai perusahaan yang melaksanakan norma kerja

2. Urusan Pangan

- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
- b. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
- c. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
- d. Masih tingginya Jumlah Desa Rawan Pangan
- e. Terbatasnya Produsen pangan segar yang menjadi keamanan pangan

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
- b. Rendahnya Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
- c. Rendahnya Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender
- d. Terbatasnya Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Minimnya pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting
- f. Terbatasnya data gender dan anak
- g. Rendahnya Cakupan Desa Layak Anak
- h. Rendahnya cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar

4. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum semua Penduduk wajib KTP memiliki KTP
- b. Belum semua penduduk usia < 17 tahun yang memiliki kartu identitas anak.
- c. Belum semua anak memiliki Akta kelahiran
- d. Terbatasnya Cakupan pemanfaatan data kependudukan

5. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- c. Belum menetapkan Grand design pembangunan kependudukan
- d. Masih rendahnya angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

6. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya limbah B3 yang diangkut atau diolah
- b. Minimnya pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
- c. Rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah
- d. Terbatasnya Pemenuhan ketentuan ijin Lingkungan dan ijin PPLH
- e. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Masih rendahnya Kualitas SDM pengelola BUMDes
- b. Kurangnya inovasi dari Desa dalam mengembangkan potensi yang ada
- c. Kurangnya Jumlah modal untuk pemberdayaan kelompok masyarakat
- d. Masih terbatasnya data potensi desa
- e. Masih kurangnya Dana untuk pembuatan peta Desa dan penetapan batas Desa
- f. Terbatasnya cakupan pembedayaan PKK

8. Urusan perhubungan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi
- b. Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi
- c. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
- d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Pelabuhan.
- e. Belum optimalnya layanan pemberian ijin dan rekomendasi bidang pelayanan

9. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil
- b. Belum optimalnya realisasi PMA dan PMDN
- c. Terbatasnya promosi penanaman modal

10. Urusan Koperasi dan UMKM

- a. Minimnya pembinaan terhadap koperasi aktif karena kurangnya ketersediaan SDM bidang koperasi
- b. Terbatasnya jumlah koperasi perempuan yang terbentuk
- c. Masih terbatasnya nilai transaksi UMKM di Pariwisata estate
- d. Terbatasnya kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan
- e. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.

11. Urusan Pertanian

- a. Minimnya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi
- b. Terbatasnya Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
- c. Minimnya Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Minimnya sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- b. Minimnya pemahaman badan public terhadap urgensi tersedianya informasi bagi masyarakat
- c. Belum optimalnya pembangunan sistem Elektronik di Instansi Pemerintah , hanya sebatas penyerapan anggaran tanpa memaksimalkan manfaat dari sistem yang telah dibangun

13. Urusan Statistik

- a. Minimnya data statistic sektoral untuk perencanaan pembangunan sektoral
- b. Minimnya data statistic sektoral untuk evaluasi hasil pembangunan sektoral

14. Urusan Persandian

- a. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi

15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Terbatasnya pengembangan wirausaha muda
- b. Belum optimalnya prestasi atlet olahraga
- c. Minimnya pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi
- d. Minimnya pembinaan organisasi kepemudaan

16. Urusan Kebudayaan

- a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal

17. Urusan Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

18. Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
- b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
- c. Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.

4.2.1.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola;
- b. Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
- c. Masih rendahnya angka konsumsi ikan

2. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Belum optimalnya pengembangan pariwisata;
- b. Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
- c. Masih rendahnya angka konsumsi ikan

3. Urusan Pertanian

- a. Rendahnya produksi tanaman pangan;
- b. Rendahnya Produksi hortikultura
- c. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian
- d. Belum optimalnya pertumbuhan populasi ternak besar
- e. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
- f. Masih tingginya kasus penyakit hewan

4. Urusan Kehutanan

- a. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetens.
- c. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah
- d. Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;

5. Urusan Transmigrasi

- a. Belum optimalnya Pengelolaan transmigrasi;
- b. Lahan untuk lokasi transmigrasi belum clear and clean

6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik;
- b. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki listrik

7. Urusan Perdagangan

- a. Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
- b. Terbatasnya Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT
- c. Belum optimalnya Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT

8. Urusan Perindustrian

- a. Terbatasnya Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online
- b. Rendahnya Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industri
- c. Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung SIINas
- d. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal

4.2.1.4 Pendukung Urusan

1. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah
- b. Belum optimalnya Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun
- c. Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4.2.1.5 Penunjang Urusan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;
- b. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal

dalam rangka peningkatan kapasitas PNS

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

6. Penghubung

- a. Belum optimalnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL.
- b. Belum optimalnya cakupan pembinaan kemasyarakatan
- c. Belum optimalnya cakupan promosi daerah

7. Pengelolaan Perbatasan

- a. Belum optimalnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan.

8. Pengawasan

- a. Masih terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. permasalahan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik
- d. Belum optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan;

4.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.3.1 Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi ancaman/tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu:

4.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) TPB / SDGs

Isu global yang berkaitan dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) 2000-2015 dan diganti dengan *Platform* baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030.

SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama- sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.3.1.2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan

komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

4.3.1.3 Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu).

Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

4.3.1.4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk

pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

4.3.1.5 Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan *visa free*, *sustainable tourism observatories* dan *conservatories*, *go digital*, *story telling on tourism*, dan *homestay* yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “*Sustainable Tourism Development*” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) *Sustainable Tourism Observatories (STOs)* yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif.

Dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk pengembangan pariwisata. Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai salah satu destinasi Super prioritas dan super premium dari 10 lokasi destinasi wisata prioritas di Indonesia. Ini menyebabkan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang dan pendorong pariwisata daerah sekitarnya.

4.3.1.6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

1. Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) Digital tourism (e-tourism); 2) Homestay; 3) Air accessibility; 4) Branding; 5) Top 10 origination; 6) Top 3 main destination (15 destination branding); 7) Develop 10 new priority tourism

destinations; 8) Certified human resources in tourism & tourism awareness movement; 9) Tourism investment growth; dan 10) Crisis center management (Kemenpar, 2019).

Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.



Sumber : Bappenas, 2020

Gambar 4.7
Destinasi Wisata Prioritas

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-

sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas.



Sumber: Lampiran 1. Perpres No. 18 Tahun 2020

Gambar 4.8.
Lokasi DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Kepulauan Nusa Tenggara

Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpan (*feeder*) di Pelabuhan Tenau Kupang; dukungan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) *Destinasi Pariwisata Super Prioritas* di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai *Destinasi Wisata Premium* yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai *Destinasi Pariwisata Super Premium*. Tujuan akhir “wisata super premium” di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bernilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai “destinasi pariwisata super premium”, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan “wisatawan super premium”. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa.

Strategi pengembangan “pariwisata super premium” secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (*sustainable luxury Labuan Bajo Flores*) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar *sustainability*. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor daratan maupun laut (bahari).

2. Ruang Lingkup

Kebijakan dan Tata Cara Kemitraan pada Wilayah Kawasan Konservasi Peraturan mengenai tata cara kerja sama pada kawasan konservasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 43 menerangkan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional atau pihak lainnya untuk kepentingan Penguatan Fungsi KSA dan KPA serta kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri LHK No 44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, pada Pasal 3 diterangkan bahwa Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman Hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya pada Pasal 5 diterangkan bahwa mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA berupa badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.

Peraturan mengenai tata cara pengajuan izin pengusahaan pariwisata alam (IUPJWA dan IUPSWA) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup

Kementerian LHK Jo Peraturan Menteri LHK No 5/MENLHK/SETJEN/KUM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK. Peraturan Menteri LHK No 8/MENLHK/SETJEN/KUM/2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, pada Pasal 4 diterangkan bahwa usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona/blok Taman nasional (kecuali zona inti) dan pada zona pemanfaatan Taman Nasional untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. Selanjut Pasal 19 menerangkan permohonan IUPJWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pasal 26 menerangkan permohonan IUPSWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD).

Dari beberapa uraian rezim perizinan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMD dalam mengembangkan destinasi wisata potensial pada kawasan konservasi, terutama taman nasional memungkinkan untuk dilakukan sepanjang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan diatas.

3. Pengembangan Ekowisata Premium Komodo

Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Tata kelola wisata premium komodo perlu dikembangkan konsep yang seimbang antara nilai etika, estetika, lingkungan, ekonomi serta lokalitas untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata serta memaksimalkan manfaat yang inklusif bagi masyarakat dan lingkungan.

Taman Nasional Komodo dibentuk pada tahun 1980 dan dinyatakan sebagai *World Haritage Site* dan *Man and Biosphere Reserve* oleh Unesco pada tahun 1986. TNK pada awalnya dibentuk untuk melindungi satwa unik Komodo (*Varanus komodoensis*), dan habitatnya. Jenis-jenis satwa darat lain yang khas termasuk burung gosong (*Megapodius reinwardt*), tikus Rinca (*Rattus rintjanus*), dan rusa Timor (*Cervus timorensis*). Sekitar 70% dari kawasan terestrial berupa hutan savana padang rumput. Tipe habitat daratan yang lain berupa hutan tropis musim (monsoon) dan hutan kuasi awan di atas 500 m sepanjang punggung dan puncak gunung. Selait daratan, Taman Nasional Komodo (TNK) meliputi salah satu kawasan laut yang paling kaya di dunia. Taman Nasional ini meliputi 1,214

kilometer persegi habitat laut dengan keanekaragaman tinggi, termasuk karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi tertutup.

Habitat-habitat tersebut mempunyai lebih dari 1000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang. Dugong (*Dugong dugon*), lumba-lumba (10 spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*) beruaya di Taman Nasional ini.

Pada saat ini, Taman Nasional dihadapkan pada berbagai masalah, baik di darat maupun perairan termasuk:

- a. Tekanan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan sumberdaya alam mengarah pada degradasi sumberdaya darat dan perairan;
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang merusak di kawasan ini merupakan ancaman terbesar bagi sumberdaya perairan;
- c. Kelebihan kunjungan wisatawan;
 - Polusi meningkat karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat untuk MCK dan sampah, tumpahan minyak/bahan bakar ke lingkungan perairan, dan sisa pupuk dan pestisida;
 - Perburuan pakan komodo, dll

Balai Taman Nasional Komodo telah melakukan kajian daya dukung wisata di TN Komodo dimana beberapa rekomendasinya antara lain : menetapkan kuota kunjungan wisata untuk masing-masing lokasi sesuai *kapasitas* data dukungnya, membangun mekanisme pengaturan dan pemberian kuota kunjungan kepada pelaku wisata serta menerapkan sistem tarif yang berbeda pada lokasi tertentu. Harapan kedepannya adalah tata kelola wisata alam berkelanjutan yang tetap memperhatikan etika sosial dan keunikan lingkungan yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo.

Dalam mewujudkan “wisata premium komodo”, salah satu persyaratan utama *adalah* terjaganya keidahan alam yang luar biasa di kawasan ini, terutama keberadaan satwa Komodo dan habitatnya. Pengembangan wisata di kawasan TN komodo kedepannya tidak lagi cukup menempuh upaya atau langkah yang biasa-biasa saja, namun perlu inovasi dalam melihat dinamika kebutuhan wisata dimasa akan datang. Destinasi wisata yang ada di kawasan TN Komodo harus diproyeksikan menjadi destinasi kelas dunia yang dicirikan dengan penerapan konsep ekowisata berkelanjutan yang mengoptimalkan potensi pariwisata yang otentik dan mengedepankan kondisi asli serta terjaganya kekayaan alam dan budaya lokal. Mempersiapkan kawasan TN Komodo sebagai wisata premium bukan berarti menutup peluang wisata menengah kebawah, akan tetapi lebih ke

bagai mana mengatur dan mendistribusikan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Kawasan TN Komodo sesuai dengan segmentasi yang disepakati.

Sebagaimana yang *telah* di sepakati di dalam meeting konkuren antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjaga aspek konservasi TN Komodo, maka akan diterapkan konsep Kawasan Wisata Super Premium dengan sistem Premium Membership. Di harapkan dengan system Premium Membership ini maka jumlah wisatawan akan dibatasi dengan maksimum jumlah kartu keanggotaan yang hanya 50.000 (lima puluh ribu) keanggotaan per tahun. Untuk dapat menunjang rencana strategis ini maka diperlukan pula langkah untuk mengidentifikasi peluang peluang bisnis turunan lainnya yang dapat menjaga sustainabilitas dari konsep super premium ini.

4. Optimalisasi Peran BUMD Flobamor

Berbagai macam isu lingkungan dan sosial-budaya serta ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Kawasan Pariwisata Super Prioritas Nasional dimana Kawasan Taman Nasional Komodo ada didalamnya, maka dirasa perlu kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian administratif wilayah melalui Badan Usaha nya (BUMD Flobamor) didalam mengembangkan wisata alam yang memperhatikan kaidah sosial dan lingkungan dengan mendorong berbagai pola kemitraan dengan pengelola kawasan TN Komodo dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, keterlibatan BUMD Flobamor didalam pengusahaan kepariwisataan Labuan Bajo, khususnya wisata alam kawasan TN Komodo diharapkan akan memberikan peningkatan langsung terhadap PAD daerah khususnya sektor pariwisata.

Kolaboratif pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan UPT melalui kemitraan baik dalam bentuk Kerja Sama Peningkatan Kawasan maupun tata kelola wisata pada zona pemanfaatan melalui IPPA, merupakan bentuk upaya bersama atau listas wewenang dalam menjaga keberadaan kawasan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kemitraan yang akan didorong oleh BUMD Flobamor dengan UPT BTNK antara lain: 1) Kemitraan dengan Taman Nasional Komodo dalam upaya penguatan fungsi dan peningkatan kapasitas kawasan Taman Nasional Komodo, 2) Izin Pengusahaan Pariwisata

Alam (IPPA) dan 3) Kemitraan Konservasi dengan Masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo.

Rencana mengenai pengembangan kawasan pariwisata premium di taman nasional komodo menitik beratkan pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan yang memperhatikan kaidah-kaidah sosial-budaya, keunikan lingkungan serta kemampuan daya dukung pariwisata di taman nasional komodo. Pengembangan konsep pariwisata premium taman nasional komodo ini diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan yang terjadi dewasa ini, baik dari sisi pengelolaan pariwisata maupun pelaku usaha sehingga konsep ekowisata berkelanjutan dapat terwujud di kawasan taman nasional komodo. Pertukaran pengetahuan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program sehingga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan dan Labuan Bajo khususnya, dan warga Provinsi NTT pada umumnya.

Pengembangan pariwisata premium taman nasional komodo dengan pencirian utama adanya segmentasi destinasi wisata terbatas dan member/keanggotaan khusus bukan berarti “memprioritaskan” orang-orang kaya atau wisatawan mancanegara yang berkunjung, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada pengaturan ruang segmen wisata serta upaya mendukung perlindungan dan pelestarian ekosistem yang “eksotis” yang berada dalam kawasan taman nasional komodo. Kesadaran berbagi ruang ini diharapkan akan mendorong kegiatan pengusahaan yang berkelanjutan baik dari sektor kepariwisataan maupun keberadaan flora dan fauna dalam mendukung kelestarian ekosistem kawasan taman nasional komodo dimasa akan datang.

4.3.2 Lingkungan Nasional

4.3.2.1 Kebhinekaan Indonesia dari sisi etnis, ras, suku, sosial, budaya dan agama

Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang membuat kondisi tersebut sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan pembangunan ke depan. Modal sosial berupa keberagaman, toleransi, kerjasama, saling kepercayaan (trust) dapat dijadikan sebagai fundasi penguat

bangunan bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerawanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Buku IV RPJMN 2020-2024 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk
Provinsi NTT Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,60	6,50	5,90	7,3	7,5
2	Tingkat Kemiskinan	18	17,35	16,15	14,56	12,35
3	Tingkat Pengganguran	2,70	2,70	2,60	2,20	2
4	Kebutuhan Investasi	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024

Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2019 bertumbuh 5,20% masih perlu kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan yang diamanatkan RPJMN pada tahun 2020 sebesar 5,60%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2019 adalah 20,62% juga masih jauh dari target RPJMN tahun 2020 sebesar 18%, sedangkan tingkat pengganguran tahun 2019 sebesar 3.35% juga masih di bawah target RPJMN tahun 2020 yang sebesar 2,70%.

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Koridor Pertumbuhan		Koridor Pemerataan	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2020

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV RPJMN 2020 - 2024, sebagai berikut:

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor unggulan

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi

perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- c. Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti:
 - 1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.
 - 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
 - 3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
 - 4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah.
- b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Ende, Manggarai, Manggarai. Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara.
- c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
- e. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di

KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;

- g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
- h. Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT; dan
- j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
 - 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - 3) Peningkatan konservasi hutan.
- k. Pengembangan Kawasan Perkotaan
Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
 - 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
 - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
 - 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
 - 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
 - 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
 - 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
 - 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan

- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua;
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
 - a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;
 - h) Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
 - i) Pembentukan bank tanah;
 - j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
 - k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.
- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:
 - a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan logistik kebencanaan;
 - b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
 - c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan

- d) Meningkatkan riset – riset dan penjangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya.
- 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:
- a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
 - b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
 - c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
 - d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
 - e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
 - f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
 - j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
 - k) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

4.3.2.3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, Proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo;
2. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
 - a. PKSN Atambua dan
 - b. PKSN Kefamenanu;
3. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

4.3.2.4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan

perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025.

Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
2. Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah;
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
4. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah :

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
 - c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu

menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

- d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.

- e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- b. Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:

- a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarnya, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun

individu.

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

4.3.3 Isu Strategis Provinsi

4.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

4.3.3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih

sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

4.3.3.4 Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

4.3.3.6 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat

diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan *Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.

4.3.3.7 Dampak Covid 19

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak Covid 19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar.

Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang

bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi selayaknya didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.

Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi.

Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstruksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha lebih luas dibanding korporasi. Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM.

Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap memproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) perlu terus didorong.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan *market place* bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.

4.3.3.8 Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan